

Marhaban Ya Ramadhan



Menyambut bulan suci Ramadhan tahun 1433 H, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya kunjungan ke Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Al-Ikhlas Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk bersilaturahmi dan pemberian bingkisan. Kunjungan ke panti asuhan ini diikuti oleh Dharma Wanita BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan utama saling berbagi diantara sesama.

Selain kegiatan kunjungan ke Panti Asuhan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengadakan Buka Bersama keluarga besar BPK RI Perwakilan Sultra. Semua pegawai baik auditor maupun penunjang serta tenaga kontrak diundang untuk mengikuti buka bersama yang diselenggarakan di Rumah Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

Untuk menambah pengetahuan keagamaan pada Bulan Ramadhan, diadakan pengajian umum yang dilaksanakan setelah sholat dhuhur. Pengajian ini diadakan di Musholla Al-Muhtasib BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

--- Mutasi Pegawai ---

Mereka yang pergi.....

1. Hostaf Prio Da Gama
AKN III
2. Rozak Muchlis Mirjaya
AKN I
3. Yuana Dwiarta
AKN VI



Mereka yang datang.....

1. Marina Padang
Pwk. Sulsel > Sub Auditorat Sultra I
2. Lilik Purnomo Kurniawan
AKN III > Sub Auditorat Sultra I
3. Fransiskus Roni MS
Pwk. Jatim > Sub Auditorat Sultra I
4. Megawatty Hutagalung
AKN VII > Sub Auditorat Sultra I
5. Yusita Nur Annisa
Pwk. Jabar > Sub Auditorat Sultra I
6. Kriesthian Widyantoro
AKN IV > Sub Auditorat Sultra I
7. Gathut Danang Widjaya
AKN I > Sub Auditorat Sultra II
8. Antonius Mahar Pamuji
Pwk. Jabar > Sub Auditorat Sultra II



tim redaksi

Pengarah
Didi Budi Satrio

Penanggung Jawab
Laode Abadi Rere

Pimpinan Redaksi
Ninie Anjarwati

Kontributor
Muhammad Lukman,
Nanang Ariagro W.,
Arlinda M. Sholikhah, Pratomo
Satrio Wibowo, Sukriadin, Yudi
Kurniawan, M. Mahmudi.

Percetakan
Dewinda Sukma R

Layout
Antoni Rizaldi Anwar, Dewinda
Sukma R.

email
www.kendari.bpk.go.id

Alamat
Jl. Sao-Sao No. 10 Kendari, Sulawesi
Tenggara
Telp. 0401-3129385
Fax 0401-3129441
Email: hukmasbpkri_sultra@yahoo.co.id

**Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H
Taqabbalallahu Minna Wa Minkum
Mohon Maaf Lahir dan Batin**

**Semoga Allah SWT menerima amal ibadah
kita dan senantiasa melimpahkan
Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya
kepada kita sekalian. Amin Yaa Rabbal 'Alamin**



**Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

catatan redaksi

Edisi ketiga kab arno periode Juli – September 2012 mewartakan kegiatan BPK RI Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan di luar pemeriksaan.

Periode Juli – September 2012 bertepatan dengan pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1433 H bagi umat muslim, serta peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 67. Selain itu, dalam periode ini diwarnai dengan adanya mutasi pegawai yang berkonsekuensi pada perpisahan dan penyambutan pegawai.

Pada periode ini juga ada penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe Utara, penyerahan ini adalah yang paling terlambat diantara 13 entitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara

Redaksi

Persiapan Pelaksanaan Pra Penandatanganan Nota Kesepahaman e-Audit



1 Pra Penandatanganan e-Audit

- 2**
- * Penyerahan LHP Konut
 - * PTL Rekomendasi BPK
 - * HUT RI ke-67

3

- * Penyerahan LHP
- * Diklat Pemeriksaan Aset

4

- * Marhaban ya Ramadhan
- * Mutasi Pegawai
- * Selamat Idul Fitri

Berkaitan dengan belum dilaksanakannya Penandatanganan MoU e-Audit di wilayah Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 September 2012 bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan kegiatan pertemuan antara BPK RI dengan para Sekretaris Daerah, Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) e-Audit antara BPK RI dengan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara.

Acara yang dihadiri oleh 11 entitas dari 13 di wilayah Sulawesi Tenggara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa penerapan e-Audit nantinya akan mengefektifkan pelaksanaan audit dan mengurangi intensitas pertemuan antara auditor dengan auditee. Selain itu, Kepala Perwakilan juga menginformasikan bahwa penandatanganan MoU e-Audit

di Kendari termasuk yang terlambat dibandingkan dengan perwakilan-perwakilan yang lain.

Setelah sambutan pembuka oleh Kepala Perwakilan, acara dilanjutkan dengan agenda pemaparan finalisasi draft MoU e-Audit oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, kepada perwakilan dari masing-masing pemerintah daerah diberikan draft MoU e-Audit untuk diteliti sebelum diparaf sebagai tanda persetujuan atas format dan substansi draft tersebut.

Agenda berikutnya adalah pemaparan petunjuk teknis e-Audit yang disampaikan oleh Dodik Ahmad Akbar mewakili tim implementasi e-Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain pemaparan petunjuk teknis, dibahas pula sekilas mengenai hal-hal yang dimuat dalam MoU Petunjuk Teknis e-Audit antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Kendari, dan MoU Petunjuk Teknis e-Audit antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Penyerahan LHP atas LKPD Konawe Utara



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD, BPK RI wajib menyampaikan LHP atas LKPD. Memenuhi ketentuan tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2012 bertempat di ruang VIP Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD, Kepala Daerah dan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.

Dari 13 entitas pemeriksaan di Sulawesi Tenggara, penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe Utara adalah yang paling terlambat. Hal ini dikarenakan penyerahan LKPD oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada BPK RI yang terlambat.

Opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2011 adalah *disclaimer* atau opini tidak menyatakan pendapat. Opini tersebut diberikan BPK karena dalam pemeriksaan ditemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Selain itu, BPK juga tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan serta lingkup pemeriksaan yang tidak cukup memungkinkan BPK RI untuk menyatakan pendapat.

Dalam acara penyerahan tersebut Kepala Sub Auditorat Sultra II, Nelson H.H. Siregar, menekankan kepada Pemkab Konawe Utara agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi atas temuan BPK. Hal ini disampaikan karena Pemkab Konawe Utara tidak melakukan tindak lanjut perbaikan secara signifikan sesuai rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya.

PTL Rekomendasi BPK

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, entitas pemeriksaan yang telah diperiksa diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2012, bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut. Dalam kegiatan ini BPK mengundang inspektorat se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pembahasan dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI.

Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi BPK untuk semester Januari-Juli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan di beberapa ruangan yakni aula, ruang rapat dan ruang *press conference*. Penggunaan beberapa ruangan tersebut dikarenakan kapasitas aula yang tidak mencukupi.

Dengan adanya kegiatan pemantauan ini, BPK mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan agar terwujud tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang baik.

Upacara HUT RI ke-67



Untuk merenungkan kembali dan menghayati perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2012, Keluarga Besar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melangsungkan upacara bendera memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-67 di halaman Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam upacara ini yang bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, dengan Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Yudi Kurniawan, selaku Komandan Upacara.

Tema peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-67, adalah "Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, dan Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan Untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Bercermin dari tema tersebut, sebagaimana Sambutan Ketua BPK RI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upacara bendera peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-67 yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan tahun 1433 H ini diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh rangkaian upacara dilalui dengan tertib sampai Komandan Upacara membubarkan peserta upacara untuk mengakhiri



Penyerahan LHP

Pajak di Bendahara Pengeluaran Kab. Kolaka Utara



Pada Semester II Tahun Anggaran 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan **pemeriksaan kinerja**. Salah satu pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan adalah Pemeriksaan Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kinerja bendahara pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan LHP Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 28 Agustus 2012. Penyerahan LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sub Auditorat Sultra I menyampaikan bahwa kinerja bendahara pengeluaran dalam perpajakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa temuan sebagaimana diungkap dalam LHP. Menanggapi hal tersebut, Plh. Sekda Kabupaten Kolaka Utara memberikan sambutan positif dan berterima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dengan adanya temuan tersebut, Pemkab Kolaka Utara diingatkan atas permasalahan perpajakan dan dapat terhindar dari permasalahan yang lebih besar nantinya.

Kinerja PDAM Kabupaten Kolaka



BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II melaksanakan pemeriksaan kinerja PDAM Kabupaten Kolaka. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kinerja PDAM Kabupaten Kolaka.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan LHP Kinerja PDAM Kabupaten Kolaka di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 28 Agustus 2012. Penyerahan LHP diserahkan oleh Kepala Sub Auditorat Sultra I BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Kolaka. Selain itu, LHP juga diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka dan Direktur Utama PDAM Kolaka.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sub Auditorat Sultra I menjabarkan permasalahan yang ditemukan oleh tim pemeriksa pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Menanggapi uraian permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Sub Auditorat Sultra I, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka menyampaikan ucapan terima kasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Dari pemeriksaan tersebut, DPRD dapat menentukan langkah perbaikan yang harus dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Kolaka serta mengawasi pelaksanaan perbaikan tersebut.

Diklat Pemeriksaan Aset



Pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan kegiatan diklat pemeriksaan aset. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Pusdiklat BPK RI dengan Subbag SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembukaan kegiatan diklat ini dilaksanakan oleh Kasubaud Sultra II, Nelson Humiras Halomoan Siregar, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Erwin Antoni, dari Pusdiklat BPK RI.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 41 orang pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini, pemateri memberikan pemahaman atas definisi barang milik daerah, manajemen aset, *redflags* pada manajemen aset, perlakuan akuntansi atas aset, asersi aset dan pemeriksaan atas aset dalam rangka pemeriksaan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Diklat pemeriksaan aset ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan auditor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Diharapkan nantinya pemahaman yang diperoleh dalam diklat ini dapat diterapkan dengan baik pada saat pemeriksaan. Setelah semua materi disampaikan, Kasubaud Sultra II menutup acara secara resmi pada tanggal 8 Agustus 2012.